



**ANALISIS PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT
(KUR) SECARA OPTIMAL PADA PT. BANK NAGARI
CABANG KAMBANG**

Jhon Fernos¹⁾, Hidayat Fajri Gusmanto²⁾
^{1,2)} Akademi Keuangan dan Perbankan Padang
hidayatfajrigusmanto@gmail.com

ABSTRACT

The aim of the research is to determine the analysis of the implementation of providing People's Business Credit (KUR) to PT. Bank Nagari Kambang Branch. The analytical method of this research uses quantitative methods and describes descriptively using observation and interview methods. Regarding the analysis of the implementation of the provision of People's Business Credit (KUR) at PT. Bank Nagari Kambang Branch, results of research at PT. Bank Nagari Kambang Branch caused the increase and decrease due to lack of socialization, completeness of customer distance or radius requirements from the channeling bank and SID (Debtor Information System) data for customers who have other loans in Non-Current conditions as well as People's Business Credit (KUR) not only distributed by PT. Bank Nagari Kambang Branch but is also distributed by many other banks.

Keywords: *People's Business Credit (KUR), Bank*

Submit : July 30th, 2025

Acceptance : July 31th, 2025

PENDAHULUAN

Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang ada di Indonesia yang mempunyai peran penting bagi kelangsungan perekonomian Indonesia. Bank juga merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat, dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito kemudian menyalurkan dana dalam bentuk kredit bagi masyarakat yang membutuhkannya. Setelah itu bank juga sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang dan menerima pembayaran dalam segala bentuk, mulai dari pembayaran listrik, telepon, uang kuliah, dan lainnya.

Bank sangat amat dibutuhkan masyarakat oleh karena itu aktivitas dan penyelenggaraan kegiatan perbankan harus secara selaras, teratur dan terencana mengacu kepada kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah, khususnya Peraturan Bank Indonesia (Pratama & Fernos, 2019). Berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang perbankan, fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana pada masyarakat dalam bentuk kredit. Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat disamakan

dengan itu, yang berdasarkan dengan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melaksanakan kembali pembayaran dengan jumlah yang telah ditetapkan sesuai dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil dan keuntungannya.

Sedangkan menurut (Chosyali & Sartono, 2019) Kredit adalah sumber utama penghasilan bagi bank yang merupakan sekaligus sumber operasi terbesar, sebagian besar dana operasional diputar dalam bentuk kredit. Bila kegiatan tersebut berhasil maka usaha bank pun berhasil. Namun bila bank banyak terjerat kredit bermasalah, hal ini akan berpengaruh besar bagi operasional bank. Kredit yang akan diberikan berdasarkan kepada kepercayaan. Sehingga sama dengan demikian, pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa bank akan memberikan kredit kalau ia benar-benar yakin bahwa si penerima kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Kebijakan KUR baru dimulai dengan adanya keputusan Rapat Kabinet Terbatas yang diadakan pada tanggal 9 Maret 2007 bertempat di Kantor Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang kala itu masih dipimpin Bapak Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam sidang tersebut salah satu kebijakan yang diambil kala itu adalah, bahwa sebagai salah satu bentuk upaya pengembangan usaha Usaha Mikro Kecil, Menengah (UMKM) dan koperasi, pemerintah akan mendorong peningkatan akses pelaku UMKM dan koperasi kepada kredit atau pembiayaan melalui perbankan dengan peningkatan kapasitas perusahaan penjamin. Kredit Usaha Rakyat digulirkan pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 5 November 2007 kemudian didukung oleh Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009 untuk menjamin implementasi atau percepatan pelaksanaan KUR ini, berbagai kemudahan bagi pelaku kegiatan UMKM pun ditawarkan oleh pemerintah. Beberapa diantaranya adalah tentang bagaimana penyelesaian kredit bermasalah UMKM. Ketetapan Menteri keuangan No. 135/PMK.05/2008 tentang fasilitas penjaminan KUR. Supaya kredit yang diberikan tersebut lancar, maka pihak bank harus selektif dalam memberikan kredit pada kreditur, dimana sebelum kredit diberikan kepada debitur maka pihak bank harus menganalisa pemberian kredit tersebut untuk menentukan kesanggupan kreditur membayar kembali pinjaman sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam perjanjian pinjaman tersebut. Oleh karena itu, bank harus bisa menetapkan prosedur atau proses pelaksanaan kredit serta mengantisipasi masalah-masalah yang timbul terhadap kredit macet. Karena itu akan berpengaruh pada aktivitas perbankan itu sendiri terutama terhadap kerja operasional bank dalam penyaluran kredit untuk kesejahteraan masyarakat.

Maksud dan tujuan pemerintah atas kebijakan KUR untuk mempercepat pengembangan yang benar serta pemberdayaan UMKM, dalam mengangkat akses pembiayaan kepada UMKM, Koperasi dalam mengatasi kemiskinan dan membuka peluang kesempatan kerja (Oktaria et al., 2022). Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung oleh fasilitas penjaminan untuk usaha produktif dan layak (*feasible*) namun mempunyai



keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan oleh perbankan. Sasaran pelaksanaan dari program KUR adalah golongan masyarakat yang telah diberikan pelatihan yang terus ditingkatkan dalam pemberdayaan serta kemandiriannya pada alokasi program sebelumnya. keinginannya agar kelompok masyarakat tersebut mampu untuk memanfaatkan skema pendanaan yang berasal dari lembaga keuangan formal seperti bank, koperasi, BPR dan sebagainya. Melihat dari sisi kelembagaan, maka sasaran KUR adalah UMKMK (Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi). Sasaran utama pelaksanaan KUR adalah semua sektor usaha yang menghasilkan (produktif).

Dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan KUR berikut dengan beberapa kebijakan pendukungnya, maka pemerintah mengharapkan dengan penyaluran KUR oleh Bank Nagari dapat dijalankan dengan baik dan didukung serta pelaksanaan sepenuhnya oleh setiap pejabat hingga rencana penyaluran KUR tersebut dapat direalisasikan sebagaimana yang diharapkan.

Tabel 1
Tingkat Pertumbuhan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Modal Kerja
PT. Bank Nagari Cabang Kambang
Periode 2022– (Januari 2025)

No	Tahun	KUR Modal Kerja			Jumlah	KUR Investasi			Jumlah	Total Keseluruhan
		Super Mikro	Mikro	Kecil		Super Mikro	Mikro	Kecil		
1	2022	75	318	20	413	6	2	780	788	1.201
2	2023	60	220	461	741	8	5	30	43	784
3	2024	1	350	512	863	40	3	70	113	976
4	2025	38	370	509	917	2	8	75	85	1.002

Sumber: PT. Bank Nagari Cabang Kambang

Berdasarkan tabel 1 diatas penyaluran kredit modal kerja, Pada tahun 2022 penyaluran kredit super mikro sebesar 75 sedangkan penyaluran kredit mikro sebesar 318 sedangkan penyaluran kredit kecil sebesar 20 dengan jumlah penyaluran kredit sebesar 413 kemudian pada tahun 2023 penyaluran kredit super mikro mengalami penurunan sebesar 60 sedangkan penyaluran kredit mikro juga mengalami penurunan sebesar 220 sedangkan penyaluran kredit kecil mengalami peningkatan sebesar 461 dengan jumlah penyaluran kredit sebesar 741, kemudian pada tahun 2024 penyaluran kredit super mikro mengalami penurunan yang sangat drastis sebesar 1 sedangkan penyaluran kredit mikro mengalami peningkatan yang sangat menonjol sebesar 350 sedangkan penyaluran kredit kecil mengalami peningkatan yang sangat menonjol sebesar 512 dengan jumlah penyaluran kredit sebesar 863 kemudian pada tahun 2025 penyaluran kredit super mikro mengalami peningkatan sebesar 38 sedangkan penyaluran kredit mikro mengalami peningkatan sebesar 370 sedangkan penyaluran kredit kecil mengalami sedikit penurunan sebesar 509 dengan jumlah penyaluran kredit sebesar 917 Sedangkan penyaluran kredit investasi pada tahun 2022 penyaluran kredit super mikro sebesar 6 sedangkan penyaluran kredit mikro sebesar 2 sedangkan penyaluran kredit kecil sebesar 780 dengan jumlah penyaluran kredit sebesar 788 kemudian pada tahun 2023 penyaluran kredit super mikro mengalami peningkatan sebesar 8 sedangkan

penyaluran kredit mikro juga mengalami peningkatan sebesar 5 sedangkan penyaluran kredit kecil mengalami penurunan yang sangat drastis sebesar 30 dengan jumlah penyaluran kredit sebesar 43, kemudian pada tahun 2024 penyaluran kredit super mikro mengalami peningkatan yang sangat drastis sebesar 40 sedangkan penyaluran kredit mikro mengalami penurunan yang sangat menonjol sebesar 3 sedangkan penyaluran kredit kecil mengalami peningkatan yang sangat menonjol sebesar 70 dengan jumlah penyaluran kredit sebesar 113, kemudian pada tahun 2025 penyaluran kredit supermikro mengalami penurunan sebesar 2 sedangkan penyaluran kredit mikro mengalami peningkatan sebesar 8 sedangkan penyaluran kredit kecil mengalami sedikit penurunan sebesar 75 dengan jumlah penyaluran kredit sebesar 85.

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Studi Lapangan (*field research*)

Yaitu penelitian langsung pada objek yang bersangkutan dengan meneliti hasil data yang diperoleh. Penelitian ini dapat membantu penulis dalam melengkapi data yang diperlukan, dengan kegiatan yang dilakukan mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan.

Studi ke Perpustakaan (*Library Research*)

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan melihat dan membaca referensi penelitian terdahulu yang terdapat di perpustakaan.

Metode Analisa Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif sebagai metode penelitian yang menjelaskan secara deskriptif tentang analisis faktor-faktor penyebab kredit macet pada PT. Bank Nagari Cabang Kambang.

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kredit

Kata kredit secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata *credere* yang berarti kepercayaan. Hal ini berarti kredit diberikan atas dasar kepercayaan dari kreditur kepada debitur bahwa kredit yang diberikannya akan dikembalikan oleh debitur dikemudian hari (Shelemo, 2023). Kredit menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayarannya akan dilakukan ditangguhkan pada satu jangka waktu yang disepakati.

Fungsi Kredit

Fungsi kredit adalah untuk memenuhi kebutuhan finansial, baik untuk keperluan pribadi maupun bisnis. Kredit juga dapat membantu meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat. Menurut (Widiantari et al., 2018), unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian kredit adalah kreditur dan pihak

Analisis Pelaksanaan Pemberian...(Fernos, Gusmanto)



yang menerima kredit. Ada beberapa fungsi kredit yaitu:

- a. Membantu mencapai tujuan keuangan,
- b. Memungkinkan pembelian barang atau jasa yang mahal,
- c. Membantu meningkatkan daya guna uang,
- d. Membantu meningkatkan peredaran uang,
- e. Membantu meningkatkan daya guna dan peredaran barang,
- f. Membantu sebagai alat stabilitas ekonomi,
- g. Membantu mendorong dan melancarkan perdagangan, produksi, konsumsi, dan jasa,
- h. Membantu meningkatkan hubungan internasional, membantu meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat.

Tujuan Kredit

Tujuan pemberian kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak di capai yang tergantung pada tujuan bank itu sendiri. Dalam prakteknya tujuan pemberian kredit adalah;

- a. Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan, hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang di terima bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang di bebaskan kepada nasabah.

- b. Membantu usaha nasabah

Tujuan selanjutnya adalah untuk membantu nasabah yang memerlukan dana, baik dan untuk investasi maupun dana untuk modal kerja atau konsumsi. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Dalam hal ini baik bank maupun nasabah sama-sama diuntungkan.

- c. Membantu Pemerintah

Tujuan lainnya adalah membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak bank semakin baik, mengingat semakin semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan diberbagai sektor terutama sektor rill (Andesti & fernos, 2024).

Unsur-unsur Kredit

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian fasilitas kredit adalah sebagai berikut (Fernos & Eprinaldo, 2022):

1. Kepercayaan

Merupakan suatu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar diterima kembali pada masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian penyelidikan tentang nasabah baik intern maupun ekstern.

2. Kesepakatan

Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak Pelaksanaan Pembiayaan KUR (Kredit Usaha Rakyat). Kesepakatan dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang.

4. Risiko

Karena terdapat suatu tanggung waktu pengembalian maka akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet dalam pemberian kredit, semakin panjang jangka waktu kredit maka akan semakin besar risiko yang akan ditanggung dan sebaliknya. Risiko ini merupakan tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun risiko yang tidak disengaja.

5. Balas jasa

Balas jasa dalam berbentuk bunga dan biaya administrasi kredit merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan berdasarkan bagi hasil/nisbah.

Prinsip-prinsip Pemberian Kredit Usaha rakyat (KUR)

Menurut Widayati dan Putri (2019) manfaat yang diperoleh dari pemberian kredit oleh perbankan, dapat dilihat dari beberapa sudut yaitu dilihat dari sudut debitur:

- a. Meningkatkan usahanya dengan pengadaan sejumlah sektor produksi
- b. Kredit bank relatif mudah didapatkan jika usaha debitur diterima untuk dilayani,
- c. Memudahkan calon debitur untuk memilih bank yang dengan usahanya. rahasia keuangan debitur terlindungi.

Dilihat dari sudut pemerintah manfaat kredit yaitu:

- a. Sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi secara umum,
- b. Sebagai pengendali kegiatan usaha,
- c. Untuk menciptakan lapangan usaha,
- d. Dapat meningkatkan pendapatan Negara,
- e. Untuk menciptakan dan memperluas pasar.

Dilihat dari sudut bank manfaat kredit yaitu;

- a. Pemberian kredit untuk mempertahankan dan mengembangkan usaha bank,
- b. Membantu memasarkan produk atau jasa perbankan lainnya,
- c. Memperoleh pendapatan bunga yang diterima dari debitur,
- d. Dapat rentabilitas bank membalik dan memperoleh laba meningkat,
- e. Untuk merebut pangsa pasar dalam industri perbankan.

Dilihat dari sudut masyarakat manfaat kredit yaitu;

- a. dapat mendorong pertumbuhan dan perluasan perekonomian,
- b. mampu mengurangi tingkat pengangguran,
- c. memberikan rasa aman kepada masyarakat untuk menyimpan uangnya di bank,
- d. dapat meningkatkan pendapatan dari masyarakat.

Jenis Kredit Usaha Rakyat

Jenis-jenis kredit dapat dilihat dari dari berbagai segi antara lain, dilihat dari segi kegunaan:

1. Kredit investasi

Kredit investasi merupakan jenis kredit yang digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk kepentingan rehabilitasi.



2. Kredit modal kerja

Kredit modal kerja yaitu kredit yang ditujukan untuk membiayai keperluan modal lancar yang biasanya habis dalam satu atau beberapa kali proses produksi atau siklus usaha, misalnya untuk pembelian bahan- bahan mentah, gaji/upah pegawai, sewa gedung/kantor, pembelian barang- barang dagangan dan sebagainya.

Prinsip Pemberian Kredit 5C, 7P dan 3R

Prinsip 5C, 7P, dan 3R adalah kriteria yang digunakan bank untuk menilai kelayakan calon debitur dalam mendapatkan kredit (Djuarni & Ratnasari, 2022).

Prinsip 5C yaitu;

- a. *Character* adalah watak atau sifat nasabah, baik dalam kehidupan pribadi, kerja, atau usaha,
- b. *Capacity*: kemampuan nasabah dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh laba yang diharapkan,
- c. *Capital*: jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki nasabah,
- d. *Collateral*: barang atau objek yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap kredit yang diterima,
- e. *Condition*: situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian.

Sedangkan prinsip 7P terdiri dari;

- a. *Personality*: kepribadian,
- b. *Party*: pihak yang terlibat,
- c. *Purpose*: tujuan,
- d. *Prospect*: prospek,
- e. *Payment*: pembayaran,
- f. *Profitability*: profitabilitas,
- g. *Protection*: Perlindungan.

Prinsip 3R terdiri dari;

- a. *Returns*: pengembalian,
- b. *Repayment*: pembayaran kembali,
- c. *Risk bearing ability*: kemampuan menanggung risiko.

Analisis Kajian Kelayakan Kredit

Analisis kajian pemberian kelayakan kredit adalah proses penilaian terhadap kelayakan calon debitur untuk mendapatkan pinjaman. Analisis ini dilakukan oleh lembaga keuangan untuk menentukan apakah calon debitur layak mendapatkan pinjaman atau tidak. Penilaian kredit melibatkan serangkaian aspek penting yang dievaluasi oleh lembaga keuangan sebelum memberikan pinjaman kepada peminjam, yang kemudian disebut dengan 7P (Mubin, 2022). Berikut adalah penjelasan lengkap mengenai berbagai aspek penilaian kredit:

- a. Aspek Hukum/Yuridis yaitu aspek yang mempertimbangkan keabsahan dan kepatuhan hukum dari transaksi pinjaman. Evaluasi dilakukan terhadap dokumen kontrak, keberadaan jaminan yang sah, serta penilaian terhadap risiko hukum yang mungkin terjadi selama proses pinjaman.
- b. Aspek Pasar dan Pemasaran yaitu menelaah stabilitas dan tren pasar terkait sektor atau industri peminjam adalah bagian dari aspek ini. Evaluasi mencakup

- analisis persaingan pasar, prospek pertumbuhan bisnis peminjam, serta strategi pemasaran yang direncanakan.
- c. Aspek Keuangan yaitu evaluasi terhadap kondisi keuangan peminjam sangat penting. Ini melibatkan analisis rasio keuangan, arus kas, profitabilitas, dan likuiditas untuk memahami kemampuan peminjam dalam membayar pinjaman.
 - d. Aspek Teknis/Operasi yaitu mengamati proses operasional dan teknis dari bisnis peminjam. Ini mencakup evaluasi sistem manajemen, teknologi yang digunakan, infrastruktur, dan prosedur operasional yang ada.
 - e. Aspek Manajemen yaitu evaluasi kualitas manajemen peminjam, termasuk pengalaman, kompetensi, kebijakan manajemen risiko, serta strategi bisnis yang diterapkan oleh tim manajemen.
 - f. Aspek Sosial Ekonomi yaitu menilai dampak sosial ekonomi dari pinjaman terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat yang terlibat. Faktor-faktor ini termasuk keberlanjutan sosial, dampak sosial positif atau negatif, dan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi lokal.
 - g. Aspek AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yaitu aspek ini mengevaluasi dampak lingkungan dari kegiatan bisnis peminjam, memastikan bahwa pinjaman yang diberikan tidak merugikan lingkungan sekitar serta mematuhi standar keberlanjutan.

Keseluruhan, aspek-aspek ini membantu lembaga keuangan dalam melakukan penilaian yang holistik terhadap kelayakan pemberian pinjaman, meminimalkan risiko kredit, serta mempertimbangkan dampaknya pada berbagai aspek termasuk hukum, ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pengertian Kredit Usaha Rakyat

Kredit usaha rakyat merupakan salah satu program pemerintah untuk membantu para pengusaha kecil agar dapat mengembangkan usahanya dengan menambah modal yang didapatkan dari pinjaman bank, dengan fasilitas kredit yang diberikan pada perusahaan atau perorangan diharapkan mereka mampu membiayai kebutuhan dana jangka pendek dalam rangka pembelian, perluasan dan pembaharuan (Dewi, 2017). KUR ini disediakan hanya terbatas oleh bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah saja, yaitu: Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Tabungan Negara dan Bank Bukopin. Penyaluran pola penjaminan difokuskan pada lima sektor usaha, yaitu: pertanian, perikanan dan kelautan, koperasi, kehutanan serta perindustrian dan perdagangan. KUR ini ditujukan untuk membantu ekonomi usaha rakyat kecil dengan cara memberi pinjaman untuk usaha yang didirikannya (Monulandi et al., 2016). KUR merupakan program pinjaman kredit/pembiayaan kepada UMKM-K yang merupakan program pemerintah yang dimulai pada tanggal 5 november 2007 dengan bekerjasama dengan 7 bank nasional yaitu Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri, dan seluruh bank pembangunan daerah yang tersebar di indonesia. Pemerintah memberikan penjaminan terhadap resiko KUR sebesar 70% sementara sisanya sebesar 30% ditanggung oleh bank pelaksana. Penjaminan kur diberikan dalam rangka meningkatkanya akses UMKM-K pada sumber Pembiayaan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Analisis Pelaksanaan Pemberian...(Fernos, Gusmanto)



Menurut KEP-20/D.I.M.EKON /11/2010 tentang standar dan produk pelaksanaan kredit usaha rakyat, kur mikro adalah kur dengan plafon sampai dengan Rp.25.000.000-, (dua puluh lima juta rupiah) dikenakan suku bunga kredit pembiayaan, maksimal 22%, (dua puluh dua persen) efektif pertahun (Saputra et al. 2020). Kur yang disalurkan oleh bank pelaksana dijamin secara otomatis bersyarat oleh penjamin dengan nilai pinjaman sebesar 80% untuk sector pertanian, kelautan, perikanan, kehutanan, dan industri kecil, dan 70% untuk sector lainnya. Perusahaan penjamin kur ini adalah PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) dan perusahaan umum kredit Indonesia.

Hambatan-Hambatan Penyaluran Kredit Kur

Hambatan yang terjadi dalam proses pemberian kredit kepada masyarakat yang berpenghasilan tetap (KUR) berupa kurangnya sosialisasi lapangan sehingga masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa kredit pegawai ada di PT. Bank Nagari Cabang Kambang dan kurangnya kelengkapan persyaratan yang diserahkan nasabah sehingga proses untuk realisasi terhambat. PT. Bank Nagari Cabang Kambang pada proses pemberian kur mengalami masalah berupa radius nasabah dari bank penyalur kur cukup jauh, data SID (Sistem Informasi Debitur) nasabah yang punya pinjaman lain dalam kondisi Non Lancar, masyarakat mendapatkan bantuan pemerintah daerah, masyarakat mendapatkan fasilitas pinjaman dari pemerintah daerah dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak cuma disalurkan oleh PT. Bank Nagari Cabang Kambang namun juga banyak disalurkan oleh bank-bank lainnya.

Cara mengatasi hambatan yang dihadapi PT. Bank Nagari Cabang Kambang dalam pemberian kredit kepada masyarakat yang berpenghasilan tetap (Kredit Pegawai) dan tidak berpenghasilan tetap (KUR) yang telah terjadi yaitu dengan melakukan sosialisasi lapangan terutama kelokasi yang berjauhan dari kantor PT. Bank Nagari Cabang Kambang beserta menyebarkan brosur ke kantor/instansi/sekolah serta memasang spanduk tentang Kredit Pegawai beserta ketentuan dan persyaratan secara lengkap. Salah-satu upaya yang ditetapkan oleh PT. Bank Nagari Cabang Kambang untuk mengatasi halangan pada proses penyaluran kur yang terjadi yaitu dengan meningkatkan mutu pegawai agar lebih kreatif dalam menawarkan produk pinjaman kepada nasabah, melakukan sosialisasi ke nasabah agar terjalinnya hubungan baik antar nasabah dengan pihak bank dan memasang spanduk dan menyebar brosur tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) beserta ketentuan dan persyaratan secara lengkap.

Pengawasan Kualitas KUR

Menurut Herman (2012) mempertahankan kualitas kredit dengan baik jauh lebih penting dari pada menciptakan kredit baru. Pemberian kredit tanpa mempertimbangkan kualitas kredit, bisa menyebabkan kerugian besar dikemudian hari. Langkah pengamanan untuk mengurangi timbulnya kredit bermasalah adalah sistim pengawasan yang efektif. Bank secara periodik melaporkan kualitas aktiva produktif kepada Bank Indonesia dan kepada publik melalui laporan keuangannya. Dalam laporannya itu kualitas kredit dibagi atas lima tingkat, yaitu:

1. Lancar (L), yaitu apabila tidak terdapat tunggakan pembayaran pinjaman baik pokok ataupun bunga.

2. Dalam Perhatian Khusus (DPK), yaitu apabila terdapat tunggakan pinjaman pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 hari.
3. Kurang Lancar (KL), yaitu apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 120 hari.
4. Diragukan (D), yaitu apabila terdapat tunggakan pembayaran pinjaman baik pokok dan atau bunga sampai dengan 180 hari.
5. Macet (M), yaitu apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga diatas 180 hari.

Banyak cara yang dilakukan bank dalam mengawasi kreditnya yang beredar. Kebanyakan dari cara pengawasan tersebut dapat dijalankan dengan akal sehat saja. Lain-lainnya dapat didasarkan atas cara-cara tradisional. Tiga konsep penting sebagai dasar kontrol seperti ini adalah:

1. Pertambahan risiko kredit bisa dibatasi dengan memperpendek jangka waktu kredit.
2. Informasi dipersiapkan oleh perusahaan harus sedemikian rupa, hingga pihak bank akan selalu mengawasi munculnya kesukaran-kesukaran uang sedini mungkin.
3. Dalam peristiwa kesukaran uang bank-bank mengusahakan dapat melaksanakan opsi untuk menarik kredit tersebut.

Sistim Pengendalian KUR

Tujuan dari sistim pengendalian kredit KUR adalah untuk menjaga keamanan dan pribadi milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi kredit bank, memajukan efesiensi dalam operasional pengendalian kredit dan membantu menjaga dipatuhi kebijaksanaan perjanjian kredit antara pihak bank dengan debitur yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Tanggung jawab untuk menyusun suatu sistim pengendalian kredit KUR terletak pada manajemen bank. Subjek pengendalian kredit oleh manajemen bank terdiri dari bagian administrasi kredit, bagian petugas kredit, bagian dana, Direktur utama Tujuan dilakukannya pengendalian KUR adalah:

1. Menjaga keamanan dana milik pribadi perusahaan yang telah disalurkan pada masyarakat.
2. Memeriksa ketelitian dan kebenaran akuntansi.
3. Memajukan efesiensi dalam operasional sistim pengendalian kredit.
4. Membantu menjaga agar tidak ada penyimpangan dari kebijaksanaan perjanjian kredit yang telah disepakati.

Unsur pokok sistim pengendalian KUR pada Bank Nagari Cabang Kambang adalah:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab nasional secara tegas.
2. Sistim wewenang dan prosedur pencatatan, pengiktisaran, pelaporan dan pemeriksaan terhadap data keuangan pemberi kredit yang relevan dan dapat dipercaya.
3. Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.
4. Karyawan dan elemen bagian unit organisasi yang terlihat dalam sistim pengendalian kredit mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Sistim pengendalian kredit terhadap para debitur Bank Nagari Cabang Kambang, permasalahan yang dihadapi dalam pengembalian kredit para debitur



tidaklah selalu berjalan lancar melainkan sering terjadi banyak kendala yang dihadapi, baik yang berasal dari pihak bank maupun dari pihak debitur itu sendiri.

Permasalahan yang timbul dari pihak bank antara lain:

1. Kurang telitinya pihak bank dalam menyeleksi calon debitur dan adanya pemberian tambahan kredit sehingga terjadinya kredit macet.
2. Adanya perpanjangan jangka waktu tanpa memperhatikan prospek usaha dan kesanggupan debitur, sehingga menimbulkan kredit macet dan penyelesaian yang lama. Sehingga permasalahan yang timbul dari pihak debitur antara lain:
 - a. Sering kali debitur tidak memberikan informasi yang benar, terutama yang berkaitan dengan jaminan atau sumber dananya.
 - b. Debitur tidak mampu menggunakan dana tersebut secara efektif dan efisien, sehingga sering terjadi kekurangan dana dan keterlambatan pengembalian kredit.
 - c. Debitur sengaja atau tidak sengaja terlambat melunasi kewajiban kepada bank, sehingga pelunasan kredit tidak tepat pada waktu yang telah disepakati.

Suatu pemberian kredit dianggap sukses apabila penerimaan kredit atau debitur yang bersangkutan dapat melunasi pinjaman berikut bunga tepat diberikan pada waktu yang telah ditentukan.

Berikut prosedur penaggulangan kredit macet pada Bank Nagari Cabang Kambang:

1. Petugas kredit Bank Nagari Cabang kambang akan mengunjungi dan menghubungi debitur jika telah menunggak, dan apabila belum ada pelunasan sesuai dengan persetujuan kredit maka pihak bank akan mengambil jalan hokum dengan menyerahkan surat kepada kejaksaan untuk melakukan proses hokum dalam penyitaan barang jaminan dan dari barang penyitaan itu akan dilakukan pelelangan barang jaminan dari nasabah untuk dapat menutupi kerugian akibat kredit macet dari nasabah tersebut.
2. Adapun tindakan penyelamatan yang dapat dilakukan dalam penyelesaian tunggakan kredit modal kerja yang disalurkan Bank Nagari Kambang adalah sebagai berikut:
 - a. Penjadwalan kembali
Kebijakan yang diambil oleh pihak bank dalam hal ini memperpanjang kredit, memperpanjang waktu angsuran dan penurunan jumlah yang harus diangsur oleh debitur sehingga dengan sendirinya mengakibatkan perpanjangan waktu kredit.
 - b. Persyaratan ulang
Menerapkan keringanan kredit yang digunakan dalam hal ini adalah perubahan sebagian atau perubahan syarat-syarat kredit antara lain: kapitalisasi bunga, penundaan pembayaran bunga, penurunan suku bunga, penkonversian kredit jangka pendek menjadi kredit jangka panjang dengan persyaratan kredit yang lebih ringan.
 - c. Penataan ulang
Jika kesulitan nasabah oleh faktor modal tindakan penyelamatan yang dilakukan adalah dengan meninjau kembali situasi dan kondisi permodalan.

d. Kombinasi

Tindakan penyelamatan kredit dapat juga dilakukan dengan kombinasi tindakan-tindakan diatas.

Tingkat Pertumbuhan Kredit Macet PT. Bank Nagari Cabang Kambang
Tabel 2

**Tingkat Pertumbuhan
Kredit Usaha Rakyat (KUR) Modal Kerja
PT. Bank Nagari Cabang Kambang
Periode 2022 – (Januari 2025)**

No	Tahun	Kur Modal Kerja			Jumlah	Kur Investasi			Jumlah	Total Keseluruhan
		Super Mikro	Mikro	Kecil		Super Mikro	Mikro	Kecil		
1	2022	75	318	20	413	6	2	780	788	1.201
2	2023	60	220	461	741	8	5	30	43	784
3	2024	1	350	512	863	40	3	70	113	976
4	2025	38	370	509	917	2	8	75	85	1.002

Sumber: PT. Bank Nagari Cabang Kambang (Data diolah)

Berdasarkan tabel diatas penyaluran kredit modal kerja, Pada tahun 2022 penyaluran kredit super mikro sebesar 75 sedangkan penyaluran kredit mikro sebesar 318 sedangkan penyaluran kredit kecil sebesar 20 dengan jumlah penyaluran kredit sebesar 413 kemudian pada tahun 2023 penyaluran kredit super mikro mengalami penurunan sebesar 60 sedangkan penyaluran kredit mikro juga mengalami penurunan sebesar 220 sedangkan penyaluran kredit kecil mengalami peningkatan sebesar 461 dengan jumlah penyaluran kredit sebesar 741, kemudian pada tahun 2024 penyaluran kredit super mikromengalami penurunan yang sangat drastis sebesar 1 sedangkan penyaluran kredit mikro mengalami peningkatan yang sangat menonjol sebesar 350 sedangkan penyaluran kredit kecil mengalami peningkatan yang sangat menonjol sebesar 512 dengan jumlah penyaluran kredit sebesar 863 kemudian pada tahun 2025 penyaluran kredit supermikro mengalami peningkatan sebesar 38 sedangkan penyaluran kredit mikro mengalami peningkatan sebesar 370 sedangkan penyaluran kredit kecil mengalami sedikit penurunan sebesar 509 dengan jumlah penyaluran kredit sebesar 917 Sedangkan penyaluran kredit investasi Pada tahun 2022 penyaluran kredit super mikro sebesar 6 sedangkan penyaluran kredit mikro sebesar 2 sedangkan penyaluran kredit kecil sebesar 780 dengan jumlah penyaluran kredit sebesar 788 kemudian pada tahun 2023 penyaluran kredit super mikro mengalami peningkatan sebesar 8 sedangkan penyaluran kredit mikro juga mengalami peningkatan sebesar 5 sedangkan penyaluran kredit kecil mengalami penurunan yang sangat drastis sebesar 30 dengan jumlah penyaluran kredit sebesar 43, kemudian pada tahun 2024 penyaluran kredit super mikro mengalami peningkatan yang sangat drastis sebesar 40 sedangkan penyaluran kredit mikro mengalami penurunan yang sangat menonjol sebesar 3 sedangkan penyaluran kredit kecil mengalami peningkatan yang sangat menonjol sebesar 70 dengan jumlah penyaluran kredit sebesar 113, kemudian pada tahun 2025 penyaluran kredit supermikro mengalami penurunan sebesar 2 sedangkan penyaluran kredit mikro mengalami peningkatan sebesar 8 sedangkan



penyaluran kredit kecil mengalami sedikit penurunan sebesar 75 dengan jumlah penyaluran kredit sebesar 85.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan mengenai prosedur pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Bank Nagari Cabang Kambang maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pemberian KUR di Bank Nagari Cabang Kambang dilakukan dengan beberapa tahap yaitu: tahap permohonan kredit, tahap peninjauan kredit, tahap pemeriksaan (anilisis kredit), tahap pemberian keputusan, serta tahap pencairan kredit.
2. Para calon debitur yang ingin mendapatkan fasilitas kredit terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis serta melengkapi persyaratan yang telah ditentukan pihak bank yaitu: foto copy kartu identitas yang masih berlaku (KTP/SIM), foto debitur (suami/istri), foto copy kepemilikan agunan (STNK dan BPKB), foto copy perizinan usaha sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Agar setiap pemberian kredit kepada debitur dapat berjalan sesuai dengan ketentuan perjanjian kredit maka perlu diberlakukan pengendalian kredit baik itu pada debitur ataupun dalam stuktur organisasi perusahaan, maka sangat diperlukan alat-alat dan fungsi manajemen perusahaan yang lengkap yaitu perlu dirancngnya program yang tepat dalam hal pengendalian kredit bermasalah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis sampaikan kepada pimpinan PT. Bank Nagari Cabang Kambang yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian. Serta semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Andesti, M., & fernos, jhon. (2024). *Aktivitas Pemberian Kredit Pada Bank Nagari Cabang Pembantu Lubuk Gadang Solok Selatan. April.* <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.10485.79840>
- Abaharis, H., Julian, R. D., & Susanto, R. (2025). Pengaruh Display Product, Store Location Dan Hargaterhadap Keputusan Pembelian Pada Reni Mart Di Painan. *YUME: Journal of Management*, 8(1.1), 164-178.
- Anwar, S. ., Marlius, D., & Hidayat, H. (2024). Keputusan Pembelian Paket Kartu Data Telkomsel Dilihat dari Bauran Promosi. *Jurnal Ekobistek*, 13(4), 264–271.
- Andayani, N. P. A. S. D., & Susanti, F. (2024). ANALISIS PENGARUH PROMOSI DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK KECANTIKAN DI SUBUR FASHION CENTER. *Jurnal Akademik Ekonomi Dan Manajemen*, 1(4), 291-300.
- Ariyanti, C. D., & Fernos, J. (2025). Pengaruh Disiplin Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Pendidikan Kritis dan Kolaboratif*, 1(2), 503-

507.

- Badri, J., Putra, Y. D., & Susanto, R. (2025). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Bank Nagari Cabang Tapan Di Pesisir Selatan. *YUME: Journal of Management*, 8(1), 1165-1175.
- Candra, C., Fernos, J., & Rahmatullah, R. (2024). Remote Work Revolution: Examining the Impact of Hybrid Work Models on Employee Engagement and Productivity. *YUME: Journal of Management*, 7(3), 1665-1675.
- Chosyali, A., & Sartono, T. (2019). Optimalisasi Peningkatan Kualitas Kredit Dalam Rangka Mengatasi Kredit Bermasalah. *Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum*, 15(1), 98–112. <https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23357>
- Dewi, N. L. A. R. (2017). Analisis Sistem Dan Prosedur Pemberian Kredit Usaha Rakyat Dalam Upaya Meningkatkan Pengendalian Kredit Pada Pt.Bank Rakyat Indonesia Cabang Sangsit. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 8(1), 12. <https://doi.org/10.23887/jap.v8i1.21016>
- Djuarni, W., & Ratnasari, R. (2022). Implementasi Prinsip 5C Dalam Menentukan Kelayakan Pemberian Kredit Pada Nasabah. *Ar-Rihlah : Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 99. <https://doi.org/10.35194/arps.v2i2.2626>
- Dona, E. (2025). Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah: Studi Kasus di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Pundi*, 9(1), 75-88.
- Dona, E., & Kalstum, R. H. (2025). How Live Streaming, Product Quality, and Content Marketing Drive Purchase Intentions in the Thrift Fashion Sector?. *Economics and Digital Business Review*, 6(2), 1417-1428.
- Dona, E., & Minda, M. N. (2025). Pengaruh Worklife Balance, Reward dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Balai Diklat Keagamaan Padang. *GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 5(3), 715-732.
- Dona, E. (2024). Investasi Infrastruktur Sumatera Barat dari Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil. *JURNAL PUNDI*, 8(2), 173-182.
- Fernos, J., & Yolanda, E. Z. (2025). Pengaruh Reward dan Punishment terhadap Kinerja Karyawan pada PT Bank Nagari Cabang Utama Sumatera Barat. *GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 5(3), 470-487.
- Fernos, J., & Eprinaldo, I. (2022). Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit Pada PT. Pegadaian (Persero) UPC Belimbing Padang. *Econpapers Journal*, 1–14.
- Fitriani, K. L., & Susanti, F. (2025). DAMPAK KENAIKAN TARIF PPN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 2(1), 20-31.
- Herlin, M., & Susanti, F. (2024). PENGARUH PERSEPSI KONSUMEN DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA MOBIL MITSUBISHI DI PT. DIPO SUMBAR. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 17(2), 1398-1412.
- Hendarti, R., Susanto, R., & Gustina, L. (2024). Evaluating the Effectiveness of Employee Development Programs: Measuring Impact on Retention and Job Satisfaction. *YUME: Journal of Management*, 7(3), 1635-1643.
- Igamawarti, D., & Susanti, F. (2024). Ekuitas Merk Dan Keterlibatan Pelanggan Terhadap Minat Beli Di E-Commerce Tiktok Shop: Studi Kasus Pada



- Konsumen Celana Jeans Wanita Ditoko Jiniso. *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS EKONOMI*, 2(1), 372-384.
- Laroza, L., Martha, L., Susanti, F., Mayliza, R., & Sumiati, S. (2025). Dampak Stres Kerja dan Beban Kerja pada Turnover Intention di Bank Nagari Sumatera Barat. *GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 5(3), 507-523.
- Magdalena, M., Fernos, J., & Radiska, S. (2025). Digital Marketing Dan Gaya Hidup Pada Keputusan Pembelian Kosmetik Ms Glow Di Kota Padang. *YUME: Journal of Management*, 8(1.1), 221-234.
- Marlius, D., & Putri, S. (2025). Keputusan Pembelian Berdasarkan Kualitas Produk, Harga dan Promosi. *Jurnal Pundi*, 9(1), 27-38.
- Marlius, D., & Salamanang, W. (2025). Pengaruh Kompetensi Teknis, Kemampuan Interpersonal Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat. *Economics and Digital Business Review*, 6(2), 1363-1369.
- Marlius, D. (2025). Dampak Influencer Marketing, Price Discount Dan Bonus Pack Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Produk Fashion Shopee. *Economics and Digital Business Review*, 6(2), 1270-1279.
- Marlius, D., & Sagita, V. (2025). Pengaruh Servant Leadership Dan Integritas Terhadap Kinerja Karyawan Pada PDAM Kota Padang. *Economics and Digital Business Review*, 6(2), 177-183.
- Marlius, D., & Wulandari, V. (2025). Pengaruh Kepercayaan, Kepuasan Pelanggan dan Citra Perusahaan terhadap Loyalitas Pelanggan pada MG Store Padang. *ARZUSIN*, 5(2), 755-772.
- Monulandi, M. M., Dumais, J. N. K., & Pangemanan, L. R. J. (2016). Persepsi Nasabah Terhadap Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Kur) Oleh Pt. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Unit Tombatu, Minahasa Tenggara. *Agri-Sosioekonomi*, 12(2A), 303. <https://doi.org/10.35791/agrsosek.12.2a.2016.12928>
- Novrial, N., & Susanti, F. (2025). Pengaruh Kompensasi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Outsourcing Pada Divisi Housekeeping Di PT. Graha Sarana Duta Telkom Property Indonesia, Sumatera Barat. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 2786-2795.
- Nurfaliza, N., & Susanti, F. (2024). Customer Value Terhadap Customer Satisfaction Di Rumah Makan Ampalu Raya Ulak Karang Padang. *Economics and Digital Business Review*, 5(1), 269-280.
- Oktaria, P., Fernos, J., Keuangan, A., Pembangunan, P. ", & Padang, ". (2022). *Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Pada Bank Nagari Cabang Lubuk Gadang*. 1-17.
- Regen, R., Jamhari, J., Marlius, D., & Dona, E. (2025). The Effect Of Training, Workload And Place Of Duty On Employee Discipline. *Jurnal Ekobistek*, 14(1), 1-7.
- Regen, R., Helia, S., Marlius, D., Dona, E., & Fernos, J. (2024). Pendidikan, Pelatihan (DIKLAT) dan Pengembangan Pegawai untuk Meningkatkan Kinerja Pegawai. *Majalah Ilmiah UPI YPTK*, 49-55.
- Pratama, D., & Fernos, J. (2019). *Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Kur)*

- Pada Pt. Bank Nagari Cabang Padang. *Akademi Keuangan Perbankan*, 1–9.
- Shelemo, A. A. (2023). Analisis Hukum Penyelesaian Kredit Macet Pada Kredit Usaha Rakyat (KUR). *Nucl. Phys.*, 13(1), 104–116.
- Susanti, F., & Nora, F. (2025). Kinerja Pegawai Berdasarkan Kompetensi Kerja, Motivasi Kerja, dan Komitmen Kerja. *Jurnal Pundi*, 9(1), 39-52.
- Susanti, F. (2025). KUALITAS PELAYANAN DAN KEPERCAYAAN TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN STUDI KASUS PADA PERUSAHAAN J&TCARGO CABANG. *Jurnal Keuangan dan Manajemen Terapan*, 6(2).
- Susanti, F., & Gusman, A. (2025). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Tarif Dan Fasilitas Terhadap Kepuasan Pelanggan Pengguna Bus Trans Padang Koridor 1. *Economics and Digital Business Review*, 6(2), 1072-1083.
- Susanti, F., & Lestari, V. E. W. (2024). Etika Bisnis dan Kualitas Produk terhadap Loyalitas Nasabah Bank BPR Lengayang. *AKSIOMA: Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi*, 1(7), 304-317.
- Widiantari, N. M. D., Suwendra, I. W., & Yudiaatmaja, F. (2018). Pengaruh Penilaian Kredit terhadap Keputusan Pemberian Kredit pada BPR. *Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen*, 9(2005), 71–78. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JMI/article/download/38240/18980/90349>